

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di abad ke-21 ini, kebutuhan utama negara-negara dunia bukan lagi mengkolonialisasi bangsa lain. Selain karena menguasai negara lain membutuhkan biaya yang besar, kecaman dunia internasional akan perlindungan hak asasi manusia juga semakin gencar. Setiap negara kini bersaing untuk memenuhi kepentingan nasional seperti penyediaan pangan, pendidikan, dan menjamin keamanan negara dan rakyatnya dengan cara yang lebih diplomatis melalui perdagangan dan berbagai kerja sama internasional. Dengan kebijakan luar negeri bebas aktifnya, Indonesia berkomitmen untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan semua negara di dunia sembari tetap aktif dalam berbagai kerja sama internasional.

Selain pergeseran kepentingan nasional, globalisasi juga perlahan menyoroti nilai strategis sektor pengelolaan ekonomi Samudera Pasifik dan Hindia. Dengan keberadaan negara-negara besar di Asia, kawasan ini menjadi sangat strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial-budaya dunia. Sebagai kawasan perairan terbesar di dunia dimana kedua samudera dan negara-negara agraris maupun maritim yang ada di dalamnya, wilayah ini memiliki berbagai kekayaan alam dan berpotensi

tinggi untuk mengembangkan *blue economy*¹. Dinamika geopolitik di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia ini telah membentuk konsep Indo-Pasifik yang melibatkan negara-negara yang termasuk dalam kawasan ini, termasuk Indonesia. Dengan munculnya berbagai lapangan kerja baru dari pengelolaan ekonomi di kawasan ini, negara-negara yang ada di dalamnya bisa menekan jumlah pengangguran dengan memanfaatkan jumlah dan lapisan penduduk yang beragam, terutama Tiongkok, India, dan Indonesia sebagai lima besar negara dengan populasi terbesar di dunia.

Definisi resmi dari kawasan Indo-Pasifik sendiri belum ada yang tetap dan jelas. Banyak negara memiliki persepsinya masing-masing mengenai batas geografis dan perspektif mengenai Indo-Pasifik, dan hal tersebut terus berubah seiring perubahan kepentingan nasional dari negara-negara tersebut. Namun yang pasti, secara geografis kawasan Indo-Pasifik mencakup Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, beserta negara-negara yang ada di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Setiap negara memiliki pandangan dan kepentingannya masing-masing di kawasan ini, termasuk negara-negara yang bahkan tidak masuk dalam cakupan wilayah Indo-Pasifik. Seperti Prancis dan Inggris, yang berada di luar kawasan Indo-

¹ *Blue Economy* adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menjaga kesehatan ekosistem laut. *Blue Economy* mencakup banyak kegiatan seperti pembaruan energi, pariwisata, penanganan perubahan iklim, pengelolaan limbah, perikanan, dan transportasi laut (World Bank, 2017).

Pasifik, namun mereka mempunyai pandangan dan tetap mengukung kepentingannya dalam bidang keamanan di kawasan tersebut. Beberapa negara yang memiliki pandangan berdasarkan kepentingan strategisnya masing-masing dalam bidang keamanan dan ekonomi di kawasan ini adalah AS, Australia, India, Jepang, Indonesia dan ASEAN (Haruko, 2020:1).

Samudera Hindia dalam masa perkembangannya menjadi wilayah yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia terutama dalam 20 tahun terakhir ini. Secara keseluruhan, setidaknya 12% (sekitar 20,000 unit kapal) perdagangan dunia di tahun 2015, termasuk 2,000 kapal minyak dan hampir 1000 kapal kontainer melintasi Samudera Hindia (Kazsubska, 2017). Fakta ini membuktikan nilai strategis Samudera Hindia yang membuka peluang eksplorasi *blue economy* lebih luas.

Meskipun wilayah Indo-Pasifik relatif damai, namun negara-negara yang bersangkutan melihat keperluan untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan militernya termasuk memodernisasi teknologi alutsista dan strategi pertahanan negara dan keamanan kawasan. Salah satu alasan pentingnya melakukan diplomasi pertahanan adalah untuk mencegah munculnya *security dilemma*, khususnya bagi negara-negara yang pernah mengalami isu keamanan, seperti pelanggaran HAM atau sengketa batas wilayah perairan negara.

Sebelum melangkah ke wilayah Indo-Pasifik, otoritas keamanan laut Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa masalah di wilayah perairan

Indonesia, baik isu keamanan dalam negeri maupun dengan negara lain. Khususnya Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) yang seringkali menghadapi berbagai tindakan pelanggaran kedaulatan negara oleh kapal-kapal asing dan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Contohnya adalah yang terjadi pada Desember 2019 dimana kapal Vietnam dan Tiongkok memasuki kawasan Natuna tanpa izin, sehingga Kementerian Luar Negeri Indonesia harus menyampaikan protes keras terhadap Tiongkok melalui Duta Besar nya di Jakarta (BBC, 2019). Indonesia merupakan negara dengan Angkatan Laut terkuat di Asia Tenggara, dan meskipun sudah disepakati perjanjian dengan negara-negara tetangga untuk melakukan patroli bersama, namun upaya melindungi kedaulatan dan keamanan negara masih dinilai belum cukup efektif karena militer Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan yang menghambat kerja sama militer dengan negara lain (RSIS, 2012:5). Kurangnya kekuatan militer dalam melindungi negaranya dapat mempengaruhi kredibilitas kepemimpinan negara di mata internasional. Hal inilah yang perlu diperbaiki Indonesia demi menjaga eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik.

Begitu juga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN masih mengalami berbagai tekanan dari luar yang mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan. Contohnya adalah ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS), yang juga termasuk dalam kawasan Indo-Pasifik, persetujuan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara

dengan salah satu negara kekuatan besar, yaitu Tiongkok. Beberapa negara ASEAN sudah terikat perjanjian BRI (*Belt and Road Initiative*) dengan Tiongkok, dan perjanjian tersebut menjadi tekanan bagi negara-negara penerimanya dalam memperjuangkan hak atas LCS. Meskipun Asia Tenggara adalah suatu kesatuan regional, namun setiap negara anggotanya memiliki kepentingan dan kebijakan luar negerinya sendiri-sendiri (Le Thu, 2020: 53-57). Keamanan negara dan pembangunan nasional adalah prioritas yang paling diutamakan, dan untuk memenuhinya bekerja sama dalam bidang ekonomi dan keamanan dengan negara-negara besar lain harus tetap dijaga dengan baik.

Tidak hanya Indonesia dan Asia Tenggara yang mengkhawatirkan dominasi Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik, tapi juga ada AS yang memiliki strategi untuk menggabungkan negara-negara aliansinya di kawasan ini untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok (Wallis & Batley, 2020:4). Ancaman yang mungkin muncul di kawasan ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan kerja sama dan kekuatan militer. Tidak hanya negara-negara maju, negara-negara kepulauan kecil dan berkembang juga perlu menegaskan kekuatannya dalam kerja sama di kawasan ini demi menjaga keamanan kawasan, perlindungan sumber daya alam (SDA), dan secara tidak langsung melindungi kepentingan nasional masing-masing negara. Secara singkat, diplomasi pertahanan antar negara-negara Indo-Pasifik termasuk Indonesia perlu dilakukan sebelum terjadinya berbagai

dinamika yang dapat mengubah konstelasi keamanan dan geopolitik kawasan tersebut menjadi lebih buruk. Diplomasi pertahanan sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan politis oleh otoritas negara untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara dan aliansi-aliansinya dalam melawan ancaman keamanan berasama (Cai, 2016:89-95).

Diplomasi pertahanan menjadi strategi dan kebijakan yang krusial bagi negara-negara yang memiliki potensi menjadi aktor penting di kawasan Indo-Pasifik, termasuk negara-negara dengan potensi perkembangan ekonomi yang pesat, serta negara-negara di kawasan perdagangan dunia, dan salah satunya adalah Indonesia. Strategi ini tentunya didasari kepentingan nasional yang hendak dilindungi negara di tengah persaingan geopolitik dunia, menggunakan berbagai instrumen termasuk pasukan militer dan segala sumber daya dan alutsistanya. Prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia menjadi “justifikasi” yang ideal untuk melakukan diplomasi pertahanan karena mendukung Indonesia untuk bisa secara bebas turut aktif dalam berbagai kegiatan diplomasi pertahanan yang melibatkan pasukan militernya dengan negara manapun.

Secara singkat dapat diasumsikan bahwa *driving force* diplomasi pertahanan antar negara-negara Indo-Pasifik adalah karena adanya nilai strategis dari kawasan yang juga berpotensi rawan akan kejahatan transnasional ini. Indonesia diharapkan tetap bisa mempertahankan keamanan wilayah dan kepentingannya dengan menunjukkan eksistensi

kekuatan militernya ke mata dunia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Sistem pertahanan negara terdiri dari interoperabilitas antar lembaga, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya negara. Penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, dengan berfokus pada kekuatan militernya sebagai pasukan terdepan lini pertahanan keamanan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis karena globalisasi meningkatkan kepentingan negara dan mengubah dinamika geopolitik dunia, sehingga menuntut kekuatan militer negara termasuk Indonesia untuk tetap aktif dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain di kawasan ini. Dalam bidang ekonomi, kawasan ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dunia seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, dan menjadi rute perdagangan yang strategis. Bagaimana Indonesia bisa menjaga kepentingannya akan menjaga keamanan negara dan meningkatkan kemampuan militer nasional, sekaligus menjadi aktor yang diperhitungkan di kawasan ini adalah inti dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa kepentingan nasional Indonesia yang hendak dicapai melalui partisipasi diplomasi pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik?
2. Apa saja peluang dan tantangan Indonesia dalam diplomasi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pertama, untuk mengetahui kepentingan nasional Indonesia yang hendak dicapai melalui partisipasi diplomasi pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, untuk menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam partisipasi diplomasi pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik.

1.4 Signifikansi Penelitian

Selain untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat kepada para pembaca melalui manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi akademik atau untuk dikembangkan sebagai penelitian lanjutan pada topik geopolitik, militer, dan regionalisme. Penelitian ini juga bisa membantu memberi wawasan bagi para pembaca dan akademisi mengenai potensi strategis kawasan Indo-Pasifik dan diplomasi pertahanan melalui kacamata realis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa membuka wawasan para pembaca dengan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat Indonesia akan eksistensi dan upaya pemerintah khususnya otoritas pertahanan dan keamanan negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan ASEAN di wilayah Indo-Pasifik, serta pentingnya peran militer dalam diplomasi internasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan – memperkenalkan latar belakang dari topik penelitian ini, yaitu para aktor penting dan konsep-konsep utama yang akan dibahas. Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dinamika global yang mendorong terbentuknya diplomasi pertahanan, pengenalan konsep Indo-Pasifik dan nilai strategisnya, serta bagaimana Indonesia menempatkan dirinya secara strategis dalam geopolitik di kawasan tersebut.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori – berisi tinjauan berbagai literatur dengan topik serupa sebagai fondasi dan perbandingan dengan penelitian yang akan disusun. Topik dari literatur-literatur yang akan dikaji antara lain mengenai Indo-Pasifik (definisi konsep oleh berbagai negara), Indonesia di Indo-Pasifik, kerja sama militer di Indo-Pasifik, serta kajian kemampuan militer negara-negara di Indo-Pasifik. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan konsep-konsep utama yang menjadi batasan

(kerangka teori) dalam penelitian ini. Kerangka teori penelitian terdiri dari mengenai teori yang akan digunakan yaitu Realisme, konsep mengenai kekuatan militer, keamanan kawasan, diplomasi pertahanan, dan kepentingan nasional.

Bab III: Metodologi Penelitian – pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri atas ruang lingkup penelitian, pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian juga akan dijelaskan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang akan digunakan, serta bagaimana data yang telah dikumpulkan tersebut akan disajikan agar mudah dipahami oleh pembaca.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan (Indo-Pasifik) – pada bagian ini uraian data mengenai kawasan Indo-Pasifik akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang mencakup definisi geografis oleh berbagai negara, berbagai kepentingan negara-negara besar kawasan Indo-Pasifik dan posisi Indonesia di kawasan tersebut, kemudian dilengkapi dengan analisa penulis.

Bab V: Hasil dan Pembahasan (Diplomasi Pertahanan) – pada bagian ini data mengenai kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dijabarkan dalam beberapa sub-bab yang mencakup pembahasan mengenai definisi diplomasi pertahanan, kegiatan apa saja yang dilakukan, peluang dan tantangan serta tujuan Indonesia dalam diplomasi pertahanan, kemudian dilengkapi dengan analisa penulis.

Bab VI: Kesimpulan – bagian terakhir ini berisikan rangkuman dari seluruh penelitian dan diakhiri dengan hasil analisis yang sudah dikerucutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya dalam bentuk kesimpulan naratif.

Sebelum mulai masuk ke dalam penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dan proses analisa data, penelitian ini akan membantu pembaca memahami konteks pembahasan topik penelitian dengan penjabaran mengenai kajian literatur, teori atau perspektif yang digunakan, serta konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini, pada bab dua, yaitu Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.